



## Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Ekonomi

Hana Malika Rahmah Sitorus <sup>1\*</sup>, Nabila Putri Wirani <sup>2</sup>, Zhafira Syaifani Siregar <sup>3</sup>,  
Ahmad Wahyudi Zein <sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [hnamalikarahmah@gmail.com](mailto:hnamalikarahmah@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [nabilaputriwirani@gmail.com](mailto:nabilaputriwirani@gmail.com) <sup>2</sup>, [zhafiradinda47@gmail.com](mailto:zhafiradinda47@gmail.com) <sup>3</sup>,  
[ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id) <sup>4</sup>

**Abstract,** *This study aims to analyze the impact of government spending on economic inequality in Indonesia. Government spending plays an important role in social and economic development, through allocations to the education, health, and infrastructure sectors. Although this spending can make a positive contribution to reducing inequality through income redistribution and equitable development, negative impacts can also occur if spending is not on target, accompanied by corrupt practices or regressive fiscal policies. Using a qualitative descriptive approach, this study describes how the characteristics and effectiveness of government spending affect the inequality of economic distribution and public welfare. The findings of this study indicate the importance of budget policy reform to be more inclusive, on target, and transparent in order to create equitable development.*

**Keywords:** *Fiscal Policy, Economic Inequality, Government Spending, Infrastructure, Income Redistribution*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak belanja pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, melalui alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun belanja ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menurunkan ketimpangan melalui redistribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, dampak negatif juga dapat terjadi jika pengeluaran tidak tepat sasaran, disertai praktik korupsi atau kebijakan fiskal regresif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menguraikan bagaimana karakteristik dan efektivitas belanja pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan anggaran agar lebih inklusif, tepat sasaran, dan transparan demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan.

**Kata kunci:** Belanja Pemerintah, Infrastruktur, Ketimpangan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Redistribusi Pendapatan

### 1. PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional. Ketimpangan ini terlihat dari adanya perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir cukup pesat, kenyataan menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan belum merata.

Belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen fiskal memiliki peran strategis dalam memengaruhi tingkat ketimpangan tersebut. Melalui pengalokasian dana ke sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

luas. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaruh belanja pemerintah terhadap ketimpangan sangat bergantung pada efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan sasarannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana belanja pemerintah mampu mengurangi ketimpangan ekonomi serta mengidentifikasi potensi dampak negatif yang dapat timbul dari pengelolaan anggaran yang kurang efisien.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis isi. Data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta referensi akademik yang relevan mengenai belanja pemerintah dan ketimpangan ekonomi.

Analisis dilakukan dengan mengkaji alokasi belanja pemerintah pada berbagai fungsi strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta melihat korelasinya terhadap indikator ketimpangan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti mekanisme distribusi belanja publik, efektivitas pelaksanaannya, dan berbagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan dampaknya terhadap ketimpangan.

Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan belanja pemerintah dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan ketimpangan ekonomi bila dilaksanakan secara tepat, terencana, dan transparan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintahan merupakan alokasi dana yang ditujukan untuk kepentingan kolektif masyarakat dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan dan meningkatkan kapabilitas sosial-ekonomi penduduknya. Prioritas utama dari pembelanjaan negara ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan standar hidup yang layak bagi warga, meliputi akses terhadap layanan kesehatan, sistem pendidikan berkualitas, sarana publik, infrastruktur sosial, serta pengembangan sistem perlindungan sosial sebagaimana tertuang dalam kerangka hukum UU No. 32 Tahun 2004.

Belanja pemerintah fungsi pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.7/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjelaskan bahwa belanja pendidikan merupakan alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Penetapan alokasi tersebut yaitu sekurang-kurangnya

20% dari seluruh belanja APBD. Alokasi belanja kesehatan tersirat pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa alokasi untuk kesehatan sebesar 5% diluar gaji yang berasal dari APBN, bagi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi yaitu sebesar 10% diluar gaji yang berasal dari APBD. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK. 02/2011 juga menjelaskan beberapa jenis anggaran dari fungsi kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, perbekalan kesehatan, keluarga berencana, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Terkait dengan pengeluaran negara untuk fungsi ekonomi, terutama dalam konteks pembangunan regional, fokus utamanya adalah mewujudkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan di tingkat daerah. Salah satu komponen utama dari belanja ini adalah investasi infrastruktur. Pengembangan infrastruktur memiliki tiga kontribusi strategis terhadap integrasi ekonomi: pertama, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi katalis pertumbuhan ekonomi; kedua, jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan baik sangat vital untuk memperlancar aktivitas investasi dan pertukaran ekonomi; ketiga, infrastruktur berperan dalam mengatasi disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah. Sistem infrastruktur yang optimal mampu memfasilitasi mobilitas ekonomi lintas daerah, sehingga meningkatkan daya tarik kawasan bagi para investor, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja dan mempercepat laju pembangunan. Dinamika pembangunan yang positif ini berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena ketidakmerataan dalam pembagian sumber daya finansial dan akses peluang di berbagai segmen populasi. Permasalahan ini menjadi tantangan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara. Masyarakat yang tergolong prasejahtera kerap menemui hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan status sosio-ekonomi mereka. Namun perlu dicatat bahwa kondisi ekonomi awal seseorang tidak serta-merta menentukan masa depan finansialnya. Akses terhadap sistem pendidikan berkualitas di setiap jenjang, pengembangan kompetensi, serta program pelatihan kejuruan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan sistem jaminan sosial. Pendekatan komprehensif ini berpotensi memfasilitasi mobilitas sosial ke atas dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertical dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakpemerataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan

ekonomi diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu kritis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Meski kemajuan yang terjadi telah menghadirkan sejumlah keuntungan, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga muncul, khususnya berupa kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Ketimpangan ekonomi ini termanifestasi dalam beragam dimensi, mencakup ketidaksetaraan penghasilan, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta distribusi kesempatan ekonomi yang tidak proporsional (adil). Jurang pemisah ini menciptakan fragmentasi sosial yang kentara antara golongan berkecukupan dan golongan kurang mampu, sebuah kondisi yang berpotensi menggerogoti kohesi masyarakat dan menghalangi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif. Polarisasi sosial-ekonomi semacam ini menimbulkan ancaman nyata terhadap harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Ketimpangan ekonomi telah menjadi persoalan mendesak yang merefleksikan adanya kesenjangan substansial antara segmen berpenghasilan tinggi dan segmen berpenghasilan rendah dalam tatanan sosial. Beberapa akar permasalahan mencakup distribusi struktur ekonomi yang tidak proporsional, ketimpangan pendapatan, serta ketidaksetaraan akses terhadap sistem pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dampak dari ketimpangan ekonomi tersebut memiliki implikasi luas dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Fenomena ini berpotensi mengakibatkan gejolak sosial, ketidakmerataan distribusi kesejahteraan, serta perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, situasi tersebut dapat memicu munculnya gesekan dalam masyarakat, meningkatnya ketidakpuasan publik, dan menghambat perkembangan perekonomian secara komprehensif.

### **Dampak Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Ekonomi**

Belanja yang dialokasikan oleh pemerintah memainkan fungsi krusial dalam memengaruhi derajat ketimpangan ekonomi di sebuah negara. Dampaknya bisa positif dan negatif, bergantung pada karakteristik pengeluaran, pola distribusi, dan ketepatan pelaksanaannya.

Adapun dampak positif belanja pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi adalah sebagai berikut :

### **1. Program Redistribusi Pendapatan**

Program-program seperti bantuan tunai langsung (bansos), pengurangan harga kebutuhan pokok bagi kelompok prasejahtera (subsidi), dan sistem perlindungan sosial berpotensi memitigasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

### **2. Penguatan Sektor Pendidikan dan Layanan Kesehatan**

Pengembangan kedua sektor vital ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan membuka akses kesempatan lebih luas bagi kalangan ekonomi lemah, sehingga secara berkelanjutan dapat meminimalisir ketidaksetaraan ekonomi dalam perspektif jangka panjang.

### **3. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan kurang berkembang mampu menciptakan konektivitas ekonomi baru dan mempersempit disparitas pembangunan antar daerah. Investasi infrastruktur di wilayah terpencil membuka peluang masyarakat setempat untuk mengakses pasar, layanan publik, dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi teritorial.

Adapun dampak negatif belanja pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi adalah sebagai berikut :

#### **1. Belanja yang Tidak Tepat Sasaran**

Seperti subsidi yang lebih menguntungkan kelompok kaya (misalnya subsidi BBM) justru dapat memperburuk ketimpangan.

#### **2. Korupsi dan Kebocoran Anggaran**

Menghalangi manfaat belanja pemerintah sampai ke kelompok masyarakat yang membutuhkan.

#### **3. Kebijakan Fiskal Regresif**

Seperti pajak konsumsi yang lebih membebani masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperburuk ketimpangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Romzi, Ahmad Sopian, dkk., *Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Bima.*, Seminar Nasional LPPM UMMAT., Vol.13, 2024.

Putri, Dewi Fatmala, dkk., *PROBLEMATIKA KETIMPANGAN EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA.*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen., Vol.1, No.4, 2023.

Manto (2022), *Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan Kota Depok 2022*.

Safitri, Meilissa Ike Dien, Candra, Fajri Ananda, Ferry Prasetyia., *ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR.*, JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA, DAN KEBIJAKAN PUBLIK., Vol.6, No.2, 2021.